

ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

**Andi Muchlis
E12112106**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI
ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Andi Muchlis
E12112106

Telah Diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Rabu, Tanggal 22 November 2017

Menyetujui

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, M
Sekretaris	: A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
Anggota	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
Anggota	: Dr. Hj. Nurlina, M.Si
Anggota	: A. Murfhi, S.IP, M.Si
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA
Pembimbing II	: Dr. Hj. Nurlina, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG

Yang disusun oleh

Andi Muchlis

E12112106

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 22 November 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA
NIP.19501017 198003 1 002

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nurlina, M.Si
NIP.196309211987022001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan
Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP.196309211987022001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Andi Saharuddin dan Dra Hj. Nurhayati yang telah melahirkan dan membesarkan, dengan tulus penuh kasih sayang, penuh kesabaran mendidik, membiayai dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai diperguruan tinggi. Ucapan terima kasih buat seluruh keluargaku yang selalu membantu baik berupa materil maupun non materil.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng”**. Hasil penelitian ini secara sistematis terdiri dari lima bab, yaitu BAB I : pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan dan pemecahan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. BAB II : kajian pustaka dan kerangka fikir. BAB III : Metode penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik

pengumpulan data, populasi dan sampel, serta tehnik analisis data. BAB IV : hasil penelitian dan pembahasan. BAB V : kesimpulan dan saran.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka :

1. Bapak Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam , M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Politik/Ilmu pemerintahan sekaligus sebagai penguji beserta seluruh staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA selaku pembimbing I saya yang telah banyak memberikan saran untuk penulis dan selalu membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak A. Lukman Irwan S.IP, M.Si selaku sekretaris penguji.
7. Bapak A. Murfhi, S.P, M.Si selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Andi Saharuddin dan Dra Hj. Nurhayati, yang selalu memberikan motivasi dan senantiasa memberikan doa restu kepada saya.
10. Terima kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Soppeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng, serta Pemerintah Kabupaten Soppeng Kecamatan Ganra serta tokoh-tokoh masyarakat yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis.
11. Kepada informan-informan, terima kasih telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Terima Kasih Kepada Saudara-Saudari, Sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan.

13. Terima Kasih Kepada teman seperjuangan Fraternity, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP unhas. Teman-teman KKN Gel. 90 Watangpulu Kelurahan Batulappa.

14. Terima Kasih pula penulis ucapkan kepada keluarga dan teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi, tehnik penulisan maupun bahasa yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, maupun pihak-pihak terkait pada khususnya. Semoga bantuan dan dukungan dari semua pihak mendapat Ridho dan Rahmat dari Allah SWT.

Makassar, 24 Agustus 2017

Andi Muchlis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Metodologis.....	8
1.4.3 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.6 Metode Penelitian.....	10

1.6.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	10
1.6.2 Jenis dan Desain Penelitian	10
1.6.3 Informan dan Teknik Penentuan Informan	11
1.6.4 Jenis dan Sumber Data.....	12
1.6.5 Instrumen Penelitian	13
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.7 Teknik Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bencana Banjir	17
2.2 Mitigasi Bencana banjir	19
2.3 Peranan pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir	24
2.3.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah	24
2.3.2 Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	27
2.3.3 Kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup	31
2.4 Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	37
2.5 Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam Menanggulangi Banjir	42

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Deskripsi Umum Kabupaten Soppeng	57
--	----

3.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Soppeng	57
3.1.2	Keadaan Geografis	60
3.1.3	Luas dan Ketinggian Wilayah.....	61
3.1.4	Keadaan Penduduk	63
3.1.5	Kondisi Sosial dan Budaya	65
3.1.6	Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kabupaten Soppeng	66
3.2	Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng.....	69
3.2.1	Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng	69
3.2.2	Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng	69
3.2.3	Struktur Organisasi	74
3.3	Deskripsi Umum Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng	76
3.2.1	Sejarah Singkat Kecamatan Ganra	76
3.2.2	Keadaan geografis Kecamatan Ganra	76
3.2.3	Visi dan Misi Kecamatan Ganra	77
3.2.4	Struktur Organisasi dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Ganra.....	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Karakteristik Responden	80
4.2	Peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.....	83
4.3	Peran Pemerintah Kecamatan dengan Masyarakat dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.....	90

BAB V KESIMPULAN

5.1	Kesimpulan	98
5.2	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Jarak Ibukota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Provinsi Kabupaten Soppeng	63
Tabel 3.2	Luas Wilayah dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Soppeng	65
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Menurut Kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2013	66
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Soppeng Tahun 2013	66

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	8
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	73
Gambar 3.3	Struktur Organisasi Kecamatan Ganra	76

INTISARI

Andi Muchlis, Nomor Pokok E12112106, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Judul “**ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG**”. Dibawah Bimbingan Prof. Dr. H. Gau Kadir, MA dan Dr. Hj. Nurlina, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dan untuk mengetahui hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, memberikan gambaran faktual mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan setiap penanggulangan secara tepat dan lebih baik yaitu penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang disadarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, serta dalam penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir telah terjalin dengan baik sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi dengan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Ganra yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Ganra bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya dan masyarakat juga ikut membantu serta mendukung peran pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang terjadi.

(Kata kunci: Peran, Pemerintah, BPBD, Penanggulangan, Banjir)

ABSTRACT

Andi Muchlis, Main Number E12112106, Governance Studies Program, Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Science Title **"ANALYSIS OF FLOOD DISASTER MANAGEMENT IN SUB GANRA Soppeng"**.

Under the guidance of Prof. Dr. H. Gau Kadir, M.Si and Dr. Hj. Nurlina, M.Sc.

This study aims to determine peran Regional Disaster Management Agency (BPBD) in tackling the risk of flooding in Sub-District De- Ganra All Soppeng and to find an association cooperation with the local governments of communities in managing flood risk in the District Ganra Soppeng.

This study used a qualitative approach with descriptive type, memeberikan factual overview of the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the government in tackling the risk of floods All Sub-District De- Ganra in Soppeng.

The results showed that the role of the Chief Executive of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) running any appropriate countermeasures and better that disaster management is done quickly and accurately in accordance with the demands of the situation. Good coordination with other agencies / departments related as disaster relief efforts were made aware of the good coordination and mutual medukung, as well as in disaster management should involve all parties in a balanced manner. Cooperation between the government and communities in managing the risk of floods has been good as unknown people participated in participating education / socialization to create a forum for early awareness of society Subdistrict Ganra conducted by the District of Ganra joint Disaster Management Agency (BPBD) or other agencies / departments related more and communities also help and support the government's role in the response to the flood disaster that occurred.

(Keywords: Role of Government, BPBD, Mitigation, Flood)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan pembangunan yang telah dibangun selama ini. Bencana alam yang terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam tanah, hutan, dan air secara berlebihan serta akibat perubahan cuaca atau iklim global telah mengakibatkan bertambahnya lahan kritis, selain itu dampaknya akan mengubah tata guna air, sehingga dapat mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta meningkatnya laju erosi dan sedimentasi.

Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir. Banjir merupakan suatu fenomena alam biasa, namun akan menjadi suatu yang sangat merugikan jika mengancam keberadaan hidup manusia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat

dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting dalam terjadinya bencana banjir.

Di Indonesia tercatat bahwa terdapat 5.590 sungai induk dan 600 sungai di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal. Pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada *catchment area*, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhenti. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata. terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan

tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi sarana publik yang rusak. Pemulihan ini pun membutuhkan waktu yang lama pula untuk menjadikannya seperti semula.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*) (Depkominfo, 2007: 12).

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan

pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana banjir di daerah. Salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, maka setiap kabupaten/ kota membentuk badan penanggulangan bencana alam sesuai dengan kondisi wilayahnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan resmi dibentuk sejak tahun 2009 melalui Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009 tentang perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga teknis Daerah, dan lembaga teknis lainnya. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan kemudian dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugas dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Khususnya Kabupaten Soppeng.

BPBD Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan, dan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng, maka kebijakan penanggulangan bencana dirumuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan regulasi daerah yang mendukung penyelenggaraan PB di daerah.
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pelayanan kebencanaan.
3. Mendorong kerjasama lebih aktif dengan prapihak dalam bentuk kerjasama program.
4. Mendukung BPBD Kabupaten/Kota dalam fasilitas pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat.
5. Menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan PUSPALOPS PB.

Kebijakan tersebut kemudian diteruskan dalam kebijakan BPBD Kabupaten Soppeng untuk diteruskan, sehingga Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng?

- 1.2.2 Bagaimana hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

- 1.3.1 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.
- 1.3.2 Hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam.

1.4.2 Manfaat metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran pemerintah dalam penanggulangan resiko bencana alam.

1.4.3 Manfaat praktis

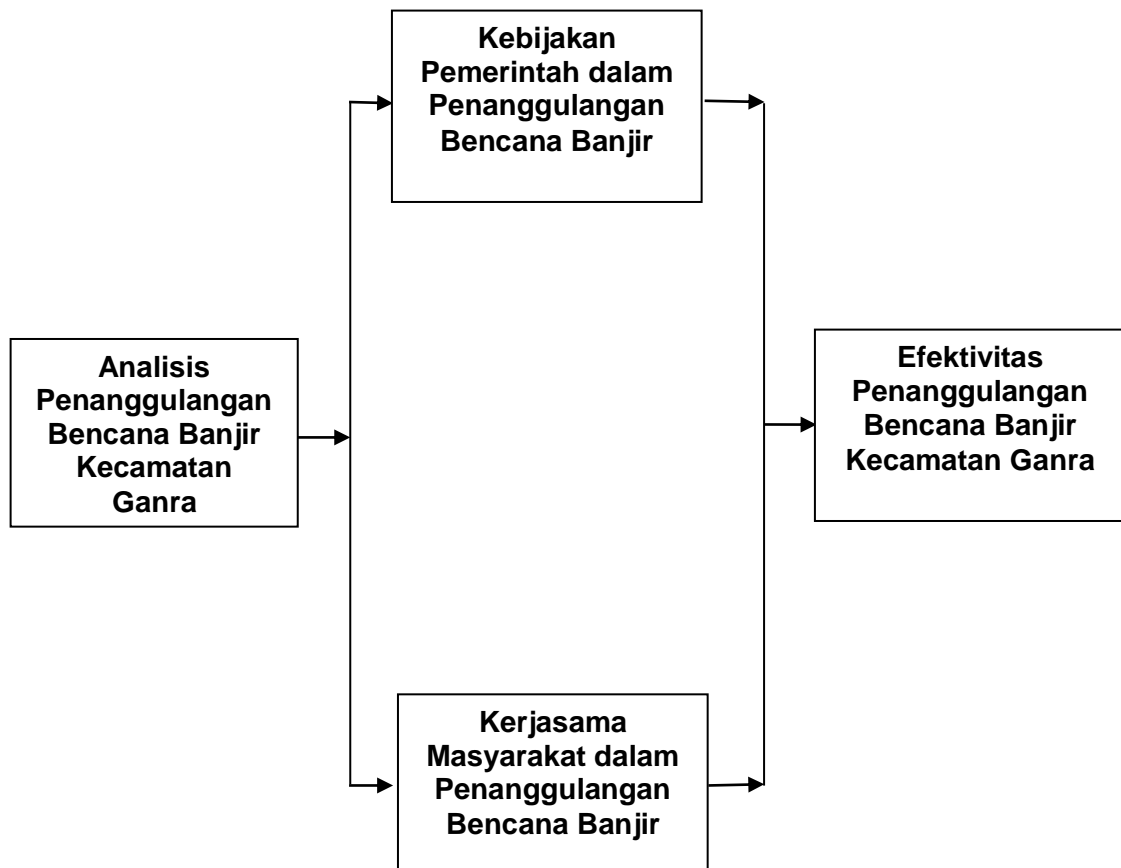
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam penanggulangan resiko bencana alam, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana alam.

1.5 Kerangka Konseptual

Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu daerah maupun instansi tertentu. Oleh karena itu, satuan unit yang bekerja khusus dalam bidang pekerjaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam harus bekerja dengan disiplin, efisien dan efektif. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan dirasakan kinerjanya oleh masyarakat yang ada di daerahnya.

Tidak terlepas dari itu penulis dalam penelitian ini, ingin mengungkapkan secara pasti apa yang mengakibatkan sering terjadi bencana banjir, maka dari itu peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Ditetapkannya Kecamatan Ganra sebagai lokasi penelitian karena daerah ini lebih fokus penanganan terhadap bencana banjir yang melanda. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari 2017.

1.6.2 Jenis dan desain penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif bertujuan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana keterkaitan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel atau kondisi suatu situasi. Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yang memiliki ciri-ciri memusatkan diri pada unit tertentu dalam berbagai fenomena (Bungin, 2011:68). Olehnya dalam menganalisis data penelitian ini yaitu untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau nyata. Sebagaimana adanya, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, tidak diuji statistik, melainkan non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif.

1.6.3 Informan dan teknik penentuan informan

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah betul-betul warga yang terlibat langsung dalam kejadian bencana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah:

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng
- b. Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng
- c. Camat Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng
- d. Staf Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Tokoh Pemuda
- g. Masyarakat korban Bencana Banjir

Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu *purposive* dan *accidental*. Penetapan *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *accidental* yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kebetulan

dijumpai atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, jika dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data.

Peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain, informan yang dipilih, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka.

Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.

1.6.5 Instrumen Penelitian

Konsistensi penggunaan instrumen penelitian dalam suatu penelitian kualitatif selalumerujuk kepada instrumen yang menunjukkan kapasitas individu peneliti. Oleh sebab itu, yang menjadi instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri (*human instrument*). Diharapkan melalui peneliti sendiri sebagai instrumen, maka penelitian ini dapat mendapatkan data yang valid dan reliabel. Hal ini mungkin dilakukan dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan.

1.6.6 Teknik pengambilan dan pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara langsung yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang objek dan fokus yang diteliti. Dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberi kebebasan seluas-luasnya bagi informan untuk

menyampaikan argumentasinya. Selain pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan alat pendukung lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan reliabilitas hasil wawancara dengan para informan berupa alat tulis dan alat rekam (*tape recorder*) untuk mencatat hasil pengamatan dan wawancara yang terjadi.

b. Observasi dalam penelitian ini yaitu sebagai teknik pengumpulan data untuk menjangkau data pada saat kejadian berlangsung. Oleh karena itu, peneliti mengamati interaksi dan percakapan yang terjadi diantara subjek yang diteliti. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk yaitu interaksi dan percakapan (*conversation*), artinya selain perilaku non verbal, juga mencakup perilaku verbal dari orang-orang yang diamati agar data yang didapatkan dapat menangkap makna dari aktivitas dan perilaku informan.

c. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data melalui penelusuran dokumen yang terkait dengan fokus penelitian, baik dalam bentuk dokumen surat keputusan, literatur ilmiah, artikel, koran, buletin, jurnal, laporan, album foto, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

1.6.7 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiono (2007: 49), keempat komponen tersebut yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan peneliti dapat dilakukan.

3. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya menjadi dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bencana banjir

Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran *drainase* atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir sering dikenal dalam 2 bentuk, berupa penggenangan pada daerah yang biasanya kering atau bukan rawa, dan banjir sebagai akibat terjadinya limpasan air dari alur sungai yang disebabkan karena debit pada sungai melebihi kapasitas pengalirannya (Siswoko, 1985:17).

Banjir disuatu tempat dengan kondisi tertentu bukan merupakan masalah bahkan bermanfaat bagi kehidupan, misalnya untuk sarana penggelontoran kayu. Banjir dapat disebabkan oleh 2 (dua) jenis penyebab, yaitu: 1). Faktor alam seperti curah hujan, erosi dan sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan *drainase* yang tidak memadai, penurunan tanah, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya; 2). Faktor manusia antara lain perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya. Kedua faktor tersebut dapat

terjadi secara bersama-sama yang dapat membuat banjir menjadi sangat merugikan.

Pada umumnya, banjir yang terjadi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

a. Banjir sebagai akibat meluapnya sungai

Jenis banjir ini terjadi karena kapasitas saluran/sungai tidak mampu menampung debit air yang ada sehingga air meluap keluar melewati tanggul sungai. Daerah yang terkena banjir jenis ini biasanya adalah daerah sekitar (kanan/kiri) sungai yang letaknya cukup rendah atau merupakan dataran banjir. Pada daerah perkotaan biasanya disebabkan oleh kapasitas *drainase*/saluran air yang ada tidak mampu menampung lagi air hujan seiring dengan pertumbuhan kota. Dapat juga terjadi suatu banjir yang terjadi di daerah hilir sebagai akibat hujan deras di bagian hulu, hal ini terjadi akibat karakteristik DAS tersebut (kelerengan, karakteristik tanah dan batuan, penutup lahan dan sebagainya) atau mungkin telah rusaknya sistem hidrologi di bagian hulu, jenis ini dikenal juga sebagai 'banjir kiriman'.

b. Banjir lokal

Banjir lokal adalah banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan dalam periode waktu tertentu (intensitas hujan) yang dapat menggenangi daerah yang relatif lebih rendah (ledokan). Jenis banjir ini dapat terjadi pada daerah ledok/cekungan fluvial yang memiliki kelembaban tanah yang tinggi

sehingga pada waktu terjadi hujan lebat, peresapan air ke dalam tanah sangat kecil. Dapat juga terjadi pada daerah ledok di perkotaan yang memiliki persentase penutupan lahan terbangun yang tinggi (permukiman) sehingga peresapan air berkurang/tidak dapat berlangsung dengan baik.

c. Banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut

Jenis banjir ini terjadi pada dataran aluvial pantai yang letaknya cukup rendah atau berupa cekungan dan terdapat muara sungai dengan anak-anak sungainya sehingga jika terjadi pasang dari laut atau '*rob*' maka air laut atau air sungai akan menggenangi daerah tersebut. Jenis banjir ini tidak disebabkan oleh hujan sehingga meskipun pada musim kemarau dapat terjadi banjir.

2.2 Mitigasi Bencana Banjir

Banjir dapat merupakan suatu bencana apabila banjir tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas manusia. Oleh karena itu, bencana banjir tidak hanya merupakan masalah fisik saja tetapi mencakup banyak aspek sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Peta kerawanan banjir dapat dijadikan dasar dalam mitigasi bencana banjir, dalam tahap kesiapsiagaan (*preparedness*), serta rekonstruksi dan pembuatan tanggul atau bendung dalam penanganan/pengurangan ancaman banjir tersebut.

Dalam pemetaan daerah rawan banjir maka sebaiknya dilakukan beberapa tahapan pemetaan, yaitu: survey tinjau, survey semi detil dan survey detil.

Berdasarkan peta kerawanan banjir yang telah dibuat, maka mitigasi bencana banjir dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara teknik (*engineering*), dan cara non teknik (*non-engineering*). Cara teknik misalnya melalui pengelolaan daerah banjir dengan membuat bendungan, bendung/dam pengendali banjir, tanggul di sepanjang sungai, pengerukan dasar sungai, dan sebagainya; sedangkan cara non teknik adalah dengan membuat peraturan tata ruang agar pemanfaatan lahan yang tidak ramah lingkungan di daerah rawan banjir dan kawasan resapan air dapat dikendalikan, serta dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan banjir.

Banjir amat sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia terutama pada musim penghujan. Kondisi semacam ini biasanya akan diikuti dengan rusaknya lingkungan, hilangnya sarana dan prasarana perkenomian masyarakat, serta kemungkinan jatuhnya korban jiwa yang meninggal, hilang, cedera dan menderita, akibat kehilangan tempat tinggal ataupun rusaknya lahan pertanian dan perkebunan. Untuk mengurangi dampak yang merugikan pada setiap terjadinya banjir tersebut, diperlukan usaha penanggulangannya secara efektif di bawah koordinasi Bakornas PBP.

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Bencana UGM Yogyakarta (2002) dalam Tarjono (1996), bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana banjir harus melewati 3 (tiga) tahap utama, yaitu:

a. Tahap sebelum bencana

Ada 4 kegiatan pokok yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral oleh Departemen atau lembaga teknis, meliputi:

1) Pembuatan Peta Rawan Banjir

Pembuatan peta rawan banjir dilaksanakan secara fungsional oleh Bakosurtanal dengan melibatkan Kantor Meneg LH/Bapedal, dan Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Pekerjaan Umum.

2) Sosialisasi peta daerah rawan banjir dan pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi ini melibatkan Departemen/Dinas Sosial, Bakornas PBP/Satkorlak PBP/Satlak PBP, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan dan instansi terkait lainnya.

3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Banjir

Pencegahan dan mitigasi banjir dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan melibatkan Satkorlak PBP/Badan Kesbanglinmas Propinsi dan Kabupaten/Kota.

4) Sistem Peringatan Dini

Peringatan dini dilaksanakan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Departemen Perhubungan dengan melibatkan LAPAN, BPP Teknologi, kantor Meneg LH/Bapedal dan instansi lain yang terlibat.

b. Tahap bencana terjadi

Ada 5 kegiatan pokok yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral, meliputi:

1) Pencarian Dan Pertolongan (SAR)

Pencarian dan pertolongan dilaksanakan secara fungsional oleh BASARNAS dengan melibatkan unsur TNI, POLRI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehutanan yang dibantu oleh PMI dan semua potensi yang ada.

2) Kaji Bencana Dan Kebutuhan Bantuan

Kaji bencana dan kebutuhan bantuan, dilaksanakan secara fungsional oleh Sekretariat Bakornas PBP dengan melibatkan Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial serta dibantu oleh PMI dan LSM.

3) Bantuan Kesehatan

Bantuan penampungan korban, kesehatan dan pangan dilaksanakan oleh Departemen Sosial dengan melibatkan Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, unsur TNI/POLRI, PMI, LSM.

4) Bantuan Penampungan dan Pangan

5) Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

Bantuan air bersih dan sanitasi dilaksanakan secara fungsional oleh Departemen Pekerjaan Umum yang dibantu oleh Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, PMI dan LSM.

c. Tahap Setelah Bencana

Pada tahap ini ada 3 kegiatan pokok yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral, meliputi: pengkajian dampak banjir, rehabilitasi dan rekonstruksi serta penanganan pengungsi korban banjir.

1) Pengkajian dampak banjir dilaksanakan secara fungsional oleh

Departemen Pekerjaan Umum dengan melibatkan Departemen Dalam Negeri/Satkorlak PBP dan unsur Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian, Bapedal, Departemen Kehutanan dan instansi terkait lainnya.

2) Rehabilitasi lahan dan konservasi biodiversitas dilaksanakan oleh

Departemen Kehutanan dengan melibatkan instansi terkait.

3) Penanganan pengungsi dilaksanakan oleh Departemen Sosial dengan

melibatkan Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, unsur TNI/POLRI, PMI, LSM.

2.3 Peranan pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir

2.3.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut Kaufman dan Rasyid (2011: 13) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan dan kekuatan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Sementara menurut Rasyid (2011: 13) bahwa secara umum tugas pokok pemerintah yaitu:

- (1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- (2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- (3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

- (4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- (5) Melakukan upaya-upaya yang meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya: membantu orang tidak mampu dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
- (6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- (7) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

Menurut Ndraha (2001: 85) yang dikutip Safiie (2007: 16), fungsi pemerintahan yaitu Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (*service*). Fungsi ini sebagai *provider* jasa publik yang baik

diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan.

Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah.

2.3.2 Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan

pihak utama yang harus merespon bencana alam. Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal.

Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal. Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu :

- a. Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal.
- b. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana.
- c. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
- d. Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal.

Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana diwilayah lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen bencana. Meningkatnya masalah banjir merupakan salah satu dampak negatif dari kebijakan pembangunan yang sampai saat ini lebih

mementingkan aspek pertumbuhan ekonomi dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan sangat kurang. Penataan lingkungan dalam rangka pembangunan di dataran banjir belum memasukkan air sebagai faktor pembatas sehingga kurang mengantisipasi adanya resiko tergenang banjir. Sementara itu, upaya mengatasi banjir sampai saat ini masih mengandalkan upaya konvensional yang berupa rekayasa struktur di sungai (*in stream*) yang mempunyai keterbatasan, bersifat represif dan kurang menyentuh akar permasalahan. Selain itu upaya mengatasi masalah banjir sampai saat ini tidak seimbang dengan laju peningkatan masalah yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Nugroho, 2004).

Dalam rangka membantu pemecahan masalah banjir khususnya di tingkat kabupaten dan kota perlu dibentuk forum komunikasi konservasi air dan banjir, yang fungsinya membantu pemerintah untuk memecahkan berbagai permasalahan air. Forum ini diharapkan akan terus berkembang sebagai sarana koordinasi yang efektif karena mekanisme kerjanya dilandasi dengan etos kerja sama yang setara, tanpa ada hambatan birokrasi. Pembangunan harus menjamin terselenggaranya konservasi air dan mencegah banjir, yang ditunjukkan dengan tata ruang yang sesuai bagi perlindungan tata air, perlindungan lahan dari berbagai kerusakan, memelihara kesuburan tanah,

konservasi air untuk berbagai penggunaan. Termasuk pengelolaan yang bijaksana untuk berbagai pemanfaatan, perlindungan banjir, dan mengurangi sedimentasi lumpur, serta berbagai sampah industri maupun rumah tangga (Alikodra, 2003).

Keberadaan banjir tidak dapat dicegah, pemerintah bersama masyarakat hanya dapat meminimalkan melalui penerapan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan, kampanye, dan bimbingan tentang cinta lingkungan diintensifkan sebagai program pembangunan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai fasilitator, tokoh dan pemuka masyarakat sebagai sosok anutan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pendamping pembangunan, dan perguruan tinggi sebagai pengembang teknologi sangat berarti untuk melangkah bersama dalam memberdayakan peran aktif masyarakat sebagai upaya pengendalian banjir dan kekeringan. Teknis pelaksanaannya dirumuskan bersama secara komprehensif di bawah koordinasi Departemen PU dan Departemen Kehutanan yang bertanggung jawab atas kelestarian sumber air dalam lingkup kawasan Daerah Aliran Sungai. Di tingkat kelembagaan penanganan masalah banjir berarti juga soal sistem hidrologi. Dalam perencanaan pengendalian banjir, pemecahannya harus ditinjau dari sudut pandang

kawasan DAS, tidak dapat per daerah administratif yang ada dalam suatu kawasan. Badan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat ditunjuk sebagai koordinator. Pembicaraan harus dilakukan bersama antar pemerintah daerah kota/kabupaten (dinas terkait) dalam satu pandangan, yaitu program perbaikan komponen-komponen sistem hidrologi DAS.

2.3.5 Kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sumber Daya Alam (SDA) seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumber daya yang penting bagi kelangsungan

hidup makhluk hidup termasuk manusia. Bahkan, Sumber Daya Alam (SDA) ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air dan sebagainya.

Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*Instrumenten Van Beleid*). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (*Juridische Milieubeleids Instrumenten*) ditetapkan oleh pemerintah melalui

berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan. Adapun arah kebijakan lingkungan hidup terbagi atas:

- 1) Arah kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam GHBN 2011-2014 dalam Basyar (2002: 2):
 - a) Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat bagi generasi ke generasi.
 - b) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi rumah lingkungan.
 - c) Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.
 - d) Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang.

e) Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur oleh undangundang.

2) Kebijakan sumber daya alam dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Pasal 1 ayat (2) tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam:

a) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketetapan ini.

b) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.

c) Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggungjawab sosial untuk

menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.

- d) Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
 - e) Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketentuan ini.
 - f) Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.
- 3) Kebijakan pengembangan sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan (Ramdhani, 2013) yaitu Reformasi pengelolaan sumber daya alam sebagai prasyarat terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat dinilai lebih baik apabila terumuskan parameter yang memadai. Secara implementatif, parameter yang dapat dirumuskan adalah:

- a) Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti prinsip dan pendekatan ekosistem bukan administratif.
- b) Kontrol sosial masyarakat dengan melalui pengembangan transparansi proses pengambilan keputusan dan peran serta masyarakat. Kontrol sosial ini dapat dimaknai pula sebagai partisipasi dan kedaulatan yang dimiliki (sebagai hak) rakyat. Setiap orang secara sendiri-sendiri maupun kelompok memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pada pengelolaan dan pelestarian pada pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c) Pendekatan utuh menyeluruh komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada parameter ini, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menghilangkan pendekatan sektoral, namun berbasis ekosistem dan memperhatikan keterkaitan dan saling ketergantungan antara faktor-faktor pembentuk ekosistem dan antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya.

- d) Keseimbangan antara eksploitasi dengan konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga tetap terjaga kelestarian dan kualitasnya secara baik.
- e) Rasa keadilan bagi rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keadilan ini tidak semata bagi generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang sesudah kita yang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik.

2.4 Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana

Persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi adalah melalui pengindraan (penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya) (Wirawan, 2002). Pengalaman seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam berbagai aspeknya sangat menentukan persepsi seseorang terhadap sesuatu. Pengalaman seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, agama maupun tradisi keseharian dari masyarakatnya. Persepsi seseorang terhadap suatu obyek dapat berubahubah. Proses perubahan persepsi disebabkan oleh proses pada sistem saraf pada indera manusia dan proses psikologis yang antara lain dijumpai dalam pembentukan dan perubahan sikap. Persepsi masyarakat terhadap suatu obyek atau peristiwa merupakan landasan pokok bagi timbulnya sikap dan perilaku. Makna positif

atau negatif sebagai hasil persepsi seseorang terhadap sesuatu sangat tergantung dari bentuk dan proses interaksinya.

Pengalaman seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan persepsinya terhadap sesuatu. Pengalaman seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam berbagai aspeknya sangat menentukan persepsi seseorang terhadap sesuatu. Pengalaman seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik sosial, ekonomi, budaya, agama maupun tradisi keseharian dari masyarakatnya.

Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat terhadap proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan (Mikkelsen, 2003) dalam Arifin (2007). Partisipasi masyarakat adalah proses dimana masyarakat turut serta mengambil keputusan. Pada hakekatnya pelibatan masyarakat merupakan bagian dari proses perencanaan untuk mengakomodasi kebutuhan, aspirasi dan fokus mereka. Tujuannya adalah untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya dampak negatif. Ini tidak hanya sekedar menghindari protes masyarakat, tetapi sebagai upaya untuk memperoleh input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka.

Ada beberapa pandangan tentang partisipasi ditinjau dari kualitas yaitu:

- 1) Partisipasi sebagai masukan kebijaksanaan, dimana informasi, aspirasi dan “*concern*” dari publik akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- 2) Partisipasi sebagai strategi, dalam konteks ini partisipasi diperlakukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari publik.
- 3) Partisipasi sebagai komunikasi, dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pemerintah (*project proponent*) memiliki tanggung jawab untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
- 4) Partisipasi sebagai media pemecahan publik, sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik.
- 5) Partisipasi sebagai terapi sosial, dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit sosial” seperti *alienation*, *pawerlessness* seperti rasa minder dan sebagainya.

Batasan tentang masyarakat cukup beragam dan mencakup berbagai faktor. Beberapa ahli telah mencoba memberi definisi tentang masyarakat. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah itulah yang dinamakan dengan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. Masyarakat merupakan setiap kelompok

manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Raph Linton dalam Soerjono (1995:26) mengatakan bahwa manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Semenjak dilahirkan manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama. Pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, maka reaksi yang timbul mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang. Reaksi dalam hubungan antar manusia cenderung untuk menyerasikan dengan sikap dan tindakan pihak lain. Hal ini pada dasarnya disebabkan manusia mempunyai dua hasrat yang kuat dalam dirinya, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain di sekelilingnya. Manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, yakni lingkungan sosial dan alam. Selain itu, dalam menyerasikan diri dengan lingkungan-lingkungan tersebut manusia senantiasa hidup dengan sesamanya untuk menyempurnakan dan memperluas sikap dan tindakannya agar tercapai kedamaian dengan lingkungannya.

Masyarakat pada dasarnya merupakan sistem adaptif karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan juga untuk bertahan. Masyarakat juga mempunyai berbagai kebutuhan yang

harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup terus. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain: informasi, energi, materi, sistem komunikasi, sistem produksi, sistem distribusi, sistem organisasi sosial, sistem pengendalian sosial, perlindungan warga masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang tertuju pada jiwa dan hartanya. Masyarakat senantiasa merupakan suatu sistem karena mencakup berbagai komponen dasar yang saling berkaitan secara fungsional.

Masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang bercorak agraris tradisional. Lebih dari 80% penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan. Integrasi sosial pada masyarakat yang bercorak agraris tradisional didasarkan atas nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang merupakan kesepakatan di antara para anggotanya. Nilai-nilai itu memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.

Secara sosial, struktur masyarakat Indonesia dicirikan masih adanya pelapisan sosial yang cukup tajam antara lapisan bawah dan lapisan atas. Pada masyarakat Indonesia tumbuh polaritas sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan. Lapisan bawah adalah mereka yang berposisi lemah, baik secara ekonomi maupun politik, sedangkan lapisan atas adalah mereka yang secara ekonomi relatif kaya dan berkuasa. Semakin meluasnya

pertumbuhan sektor ekonomi modern, perbedaan antara pelapisan sosial lapisan bawah dan lapisan atas semakin tajam.

2.5 Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam Menanggulangi Banjir

Dalam menanggulangi bencana banjir, pemerintah daerah terkait untuk meminimalisir terjadinya banjir. Efektivitas suatu kebijakan pemerintah tidak akan berarti apabila mengenai bencana banjir dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut dari pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi banjir.

Pemerintah harus melakukan hal-hal yang mengurangi banjir seperti, membuat waduk yang dapat menampung air hujan dan menyediakan tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan serta masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk menanggulangi banjir dan melakukan penghijauan atau penanaman pohon disekitar lahan kosong. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003) yang dikutip Wijayanto (2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) tentang penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Menurut Paripurno (2011), bahwa sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman, yaitu:

- a. Sumber ancaman Klimatologis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. Contoh: banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai dan badai.

- b. Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa contoh kondisi dan dinamika bumi. Contoh: letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.
- c. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. Contoh: kebocoran reaktor nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur.
- d. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh : konflik bersenjata dan penggusuran.

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil pembangunan dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas/kemampuan (*capacity*) untuk menanggulangi bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan bencana. Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin besar peluang dampak yang timbul akibat bencana. Kerentanan dan kapasitas/kemampuan adalah analog dengan dua sisi mata uang. Untuk menurunkan (tingkat) kerentanan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan dapat menurunkan (tingkat) kerentanan (fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan). Besar dampak bencana juga dipengaruhi oleh waktu datangnya kejadian bencana yaitu bencana yang datangnya secara tiba-tiba dan bencana yang terjadi secara perlahan-lahan.

Menurut Bensoon dan Clay (2004) dalam Supriyatna (2011), dampak bencana dibagi 3 (tiga) antara lain :

- a. Dampak Langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya.

- b. Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan.
- c. Dampak sekunder atau dampak lanjutan (*secondary impact*). Contoh: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Didalam Undang-Undang tersebut tidak dikenal istilah Manajemen Bencana (*Disaster Management*), melainkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dalam bahasa Inggris juga disebut *Disaster Management*.

Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat perubahan pandangan dalam penanggulangan bencana dari responsif ke pengurangan resiko dan kesiapsiagaan, terintegrasikannya penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan (nasional/daerah), penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai dari anggaran pembangunan pemerintah/pemerintah daerah dan adanya kelembagaan yang kuat serta diaturnya hak dan kewajiban rakyat.

Secara garis besar, materi yang terkandung dalam undangundang tersebut meliputi tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana

melalui tiga fase/tahapan beserta kegiatannya, perencanaan dan pendanaan serta peran lembaga kebencanaan dengan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi:

- a. Pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan,
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana,
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum,
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana,
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai,
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) dan (7) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari dampak dan ancaman bencana. Adapun pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan wewenangnya, meliputi: (1) penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional, (2) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur

kebijakan penanggulangan bencana, (3) penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, (4) penentuan kebijakan kerjasama dan penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain, (5) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, (6) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurangan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan dan (7) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Manajemen Bencana dilaksanakan melalui tiga fase/ tahapan pada fase prabencana yang dilakukan melalui Manajemen Resiko Bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat yang dilakukan melalui Manajemen Kedaruratan dan kegiatan pada fase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan melalui Manajemen Pemulihan. Tiga fase tersebut adalah 4 (empat) tahapan Siklus Manajemen Bencana yang kita kenal selama ini (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Manangement Paln*).

Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima sub sistem, yaitu:

a. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat/komunitas. Arti penting legitimasi antara lain:

- 1) Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
- 2) Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan perlindungan dari negara/ rakyat dari bencana.
- 3) Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
- 4) Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

b. Kelembagaaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana.

Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di tingkat pusat. Termasuk penerapan *Incident Command System (ICS)* dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

c. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi (nasional/daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnyanya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa:

- 1) Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.

- 2) Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses)
- 3) Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusiaan (*relief*) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
- 4) Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
- 5) Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sektor swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.
- 6) Peningkatan Kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan meningkatkan/ membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana.

Sasaran akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.

- b. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan).
- c. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB. BNPB adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas

pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan.
- c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam tugas tersebut, BNPB menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. (2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah membentuk BPBD, yang terdiri dari: (a) Badan pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah gubernur, dan (b) Badan pada tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas: (a) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, (b) Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, (c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan

peta rawan bencana, (d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, (e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, (f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang, (h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, dan (i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Deskripsi Umum Kabupaten Soppeng

3.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.359,44 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 223.826 jiwa (2010).

Soppeng adalah sebuah kota kecil dimana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja, satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yang mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat, namun saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah arung, sulewatang dan paddanreng serta pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordini oleh lili-lili yang kemudian disebut Distrikudi Zaman Pemerintahan Belanda.

Seiring menguatnya kekuatan persekutuan Goa-Tallo di Makassar, untuk mengimbangnya Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk persekutuan Tellumpocco pada perjanjian Timurung Tahun 1582. Akan tetapi, masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke 16, ditandai dengan masuknya Karaeng Tallo I Malliung yang lebih dikenal sebagai Karaeng Matoaya serta penguasa Goa Imanga'ranggi yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, telah mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, kekuatan Bugis Makassar menjadi satu kekuatan baru untuk melawan orang kafir ketika Soppeng dan Sidenreng memeluk Islam tahun 1609, Wajo 1610 dan akhirnya Bone pada tahun 1611.

Perkembangan berikutnya sepanjang abad ke 17, menempatkan Soppeng pada beberapa perubahan keputusan politik ketika persaingan Bone dan Goa semakin menguat. Jauh sebelum perjanjian Timurung yang melahirkan persekutuan Tellumpocco, sebenarnya Soppeng sudah berada di pihak kerajaan Goa dan terikat dengan perjanjian Lamogo antara Goa dan Soppeng. Persekutuan Tellumpocco sendiri lahir atas restu Goa, namun ketika terjadi gejolak politik antara Bugis dan Makassar disebabkan oleh gerakan yang dipelopori oleh Arung Palakka dari Bone, Soppeng sempat terpecah dua ketika Datu

Soppeng, Arung Mampu dan Arung Bila bersekutu dengan Bone pada tahun 1660 sementara sebagian besar bangsawan Soppeng yang lain menolak perjanjian di tas rakit di Atappang itu.

Soppeng yang memiliki sejarah cemerlang di masa lalu, dengan memperhatikan berbagai masukan agar penempatan Hari jadi Soppeng, diadakan seminar karena kurang tepat bila dihitung dari saat dimulainya Pelaksanaan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1957, sebab jauh sebelumnya di dalam lontara, soppeng telah mengenai sistem Pemerintahan yang demokrasi di bawah kepemimpinan Raja dan Datu. Maka dilaksanakan seminar sehari pada tanggal 11 Maret 2000, yang dihadiri oleh para pakar, budayawan, seniman, ahli sejarah, tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda dan LSM, dimana disepakati bahwa hari jadi Soppeng dimulai sejak pemerintahan To Manurungnge RI Sekkanyili atau Latemmamala tahun 1261, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *backward conting*, dan mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng untuk dibahas dalam Rapat Paripurna dan mengesahkan untuk dijadikan salah satu peraturan daerah tentang hari jadi Soppeng.

Dalam hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, tanggal 12 Maret 2011 telah menetapkan dan

mengesahkan suatu peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2001, tanggal 12 Maret 2001 bahwa hari jadi Soppeng jatuh pada tanggal 23 Maret 1261. Ringkasan arti dari pemakaian hari jadi Soppeng yakni angka 2 dan angka 3, karena angka tersebut mempunyai makna sejarah dan filosofinya.

3.1.2 Keadaan Geografis

Kabupaten Soppeng terletak pada depresiasi sungai walanae yang secara geografis terletak pada 4'06 – 4'32 LS dan di antara 119'42-120'06 BT dengan batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone

Sedangkan jarak Ibukota kecamatan dan jarak ke Ibukota Kabupaten Soppeng dapat digambarkan pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jarak Ibukota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Provinsi
Kabupaten Soppeng

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke (km)	
		Ibukota Kabupaten	Ibukota Provinsi
Marioriwawo	Takkalala	17	150
Lalabata	Watansoppeng	0	170
Liliriaja	Cangadi	15	158
Ganra	Ganra	8	178
Citta	Citta	35	180
Lilirilau	Cabenge	12	163
Donri- donri	Tajuncu	13	183
Marioriawa	Batu-batu	29	199

Sumber: BPS – Kabupaten Soppeng 2014

Dari tabel 3.1 dapat menunjukkan jarak kecamatan ke ibukota kabupaten Soppeng serta jarak Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1.3 Luas dan Ketinggian Wilayah

Kabupaten Soppeng terletak pada depresi sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan $\pm 700\text{km}^2$ serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 meter di atas permukaan laut.

Luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km^2 dan berada pada ketinggian rata-rata 200 meter di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng adalah Kota Watansoppeng yang berada pada ketinggian 120 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah $1.359,44\text{ km}^2$ dan berpenduduk

sebanyak kurang lebih 222.798 jiwa (2004). Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari danau tempe. Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut:

- a. Gunung Nene Conang 1.463 meter
- b. Gunung Laposo 1000 meter
- c. Gunung Sewo 860 meter
- d. Gunung Lapancu 850 meter
- e. Gunung Bulu Dua 800 meter
- f. Gunung Paowengeng 760 meter

Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa pemandian air panas alami yang bernama Lejja, pemandian mata air Ompo dan pemandian alam Citta. Lejja berjarak \pm 40 kilometer dari pusat kota, terletak di desa Batu-batu, Kecamatan Marioriawa. Kabupaten Soppeng memiliki 8 kecamatan yaitu Citta, Donri-donri, Ganra, Lalabata, Liriaja, Lilirilau, Marioriawa dan Marioriwawo dan 70 kelurahan.

Adapun Luas wilayah kecamatan pada Kabupaten Soppeng dan persentasenya yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Luas Wilayah dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Soppeng

Kecamatan	Luas Wilayah dan Persentase	
	Luas (Km ²)	Persentase %
Marioriwawo	300	20,0
Lalabata	278	18,5
Liliriaja	96	6,4
Ganra	57	3,8
Citta	40	2,7
Lilirilau	187	12,5
Donri- donri	222	14,8
Marioriawa	320	21,3
Soppeng	1500	100

Sumber: BPS – Kabupaten Soppeng 2014

Pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa kecamatan Marioriawa memiliki luas wilayah yang terluas dengan persentase wilayah yaitu 21,3% dan diikuti oleh Marioriwawo dengan persentase 20,0%. Luas wilayah yang paling kecil yaitu terdapat pada kecamatan citta dengan persentase 2,7% dengan luas wilayah yaitu 40 km². Kecamatan Marioriwawo dan Marioriawa memiliki luas wilayah yang cukup luas diikuti dengan kecamatan lalabata yang berada di ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Watansoppeng kemudian kecamatan Donri-donr, lilirilau dan liliriaja.

3.1.4 Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Kabupaten Soppeng menurut Baan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Menurut Kecamatan
Kabupaten Soppeng Tahun 2013

Kecamatan	Kependudukan		
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²)
Marioriwawo	44.578	300	149
Lalabata	44.549	278	160
Liliriaja	27.164	96	283
Ganra	11.421	57	200
Citta	8.055	40	201
Lilirilau	38.589	187	206
Donri- donri	23.085	222	104
Marioriawa	28.071	320	88
Soppeng	225.512	1500	150

Sumber: BPS – Proyeksi Penduduk, 2013

Pada Tabel 3.3 Menunjukkan bahwa jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Soppeng memiliki jumlah yang bervariasi. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu berada pada kecamatan Marioriwawo dan kecamatan Citta sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terendah. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Soppeng Tahun 2013

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total penduduk
Marioriwawo	20.791	23.787	44.578
Lalabata	21.409	23.140	44.549
Liliriaja	12.730	14.434	27.164
Ganra	5.241	6.180	11.421

Citta	3.632	4.423	8.055
Lilirilau	18.115	20.474	38.589
Donri- donri	10.766	12.319	23.085
Marioriawa	13.427	14.644	28.071
Soppeng	106.111	119.401	225.551

Sumber: BPS – Proyeksi Penduduk, 2013

Berdasarkan pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa jumlah pertumbuhan perempuan memiliki angka yang lebih tinggi daripada angka pertumbuhan laki-laki. Ini dilihat dari jumlah total perempuan yaitu 119.401 jiwa sedangkan laki-laki yaitu 106.111 jiwa.

3.1.5 Kondisi Sosial dan Budaya

Berbicara mengenai kebudayaan Soppeng dan masyarakatnya sesungguhnya tidak lain sedang membicarakan mengenai masyarakat petani dalam kebudayaan bugis, atau dengan kata lain membicarakan mengenai masyarakat bugis daratan bukan masyarakat bugis pelaut dan penjelajah sebagaimana yang telah dikenal selama ini. Singkat kata mungkin orang-orang Soppeng adalah mewakili cikal bakal semangat kepeloporan masyarakat bugis.

Selama berabad-abad kaum bugis telah dikenal di sentero kepulauan nusantara sebagai kaum pedangan, perantau dan pemukim bahkan bajak laut. Crawford, gubernur pertama dari Singapura menjelaskan bahwa kaum bugis adalah tergolong masyarakat yang

paling canggih dan paling inovatif di antara seluruh suku bangsa di kepulauan Nusantara ini.

Kaum bugis menaruh penghargaan yang sangat tinggi pada kehormatannya. Mereka menyebut prinsip ini sebagai “Siri”. Semua kaum bugis harus memperjuangkan dengan segala cara untuk menjaga kehormatannya sendiri, keluarga dan masyarakatnya.

3.1.6 Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kabupaten Soppeng

Pemerintah Kabupaten Soppeng menjalankan pemerintahan dengan visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

Visi : Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik

- Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan yang menjadi kewenangannya. Karena pada hakekatnya pemerintahan adalah melayani rakyatnya.
- Melayani dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan rakyat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat.
- Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip partisipasif aktif,

transparansi, responsive, musyawarah mufakat, berkeadilan, efektif dan ekonomis serta akuntabilitas.

Adapun misi pemerintahan Kabupaten Soppeng yaitu sebagai berikut:

Misi : 7 Tekad Pemerintahan yang Melayani

- Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani
- Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi semua warga
- Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
- Menata kepariwisataan dan transportasi publik yang baik dan nyaman
- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi
- Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan murah
- Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta berpartisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

2 Tekad Menjadikan Soppeng Lebih Baik

- Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan
- Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan. Adapun kerangka strategi yang akan dilaksanakan dalam usaha menacapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Apabila dilihat dari kerangka rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Soppeng, menerapkan dua strategi pembangunan yaitu:

1. *Empowerment*

Strategi ini pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah persoalan loyalitas, sebab *civil society* akan lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal.

2. *Rowth With Distributions*

Strategi pertumbuhan dengan distribusi merupakan strategi pembangunan yang lahir dari kegagalan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja tanpa diikuti dengan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berarti kalau dsitribusi pendapatan dalam masyarakat timpang.

3.2 Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng

3.2.1 Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng terbentuk berdasarkan penjabarandari amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3.2.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng

Adapun visi BPBD Kabupaten Soppeng yaitu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Melayani dan Lebih Baik. Visi BPBD Kabupaten Soppeng memiliki makna operasional sehingga visi ini dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat (*desirable*), dimungkinkan untuk mewujudkan (*feasible*), terpusat pada kondisi tertentu (*focused*), sangat

fleksibel (*flexible*), dan dapat dikomunikasikan secara menyeluruh (*comunicable*). Berikut penjelasan Visi BPBD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yaitu:

- **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran**

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana/kebakaran, kegiatan pencegahan bencana/kebakaran, kegiatan pencegahan bencana/kebakaran, tanggap darurat/ kebakaran dan rehabilitasi/ rekonstruksi.

- **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang melayani:**

Proses penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran yang melayani dimaknai ketangguhan penanggulangan bencana yang teraktualisasi melalui kecepatan dan ketepatan penanggulangan bencana sehingga dampak bencana dapat dieleminir sedikit mungkin yang akan berimplikasi pada kurangnya resiko dan korban. Pelayanan penanggulangan bencana/kebakaran akan didekatkan pada masyarakat dengan mengembangkan konsep kewilayahan seperti penempatan posko damhar di tiap kecamatan, serta melibatkan partisipasi *stakeholder* dan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

▪ **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran**

Lebih Baik:

Lebih baik dimaknai sebagai upaya sadar BPBD Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kinerja pelayanan melalui proses kreatif, inovatif, responsif, dan proaktif dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Lebih baik juga dimaknai dengan pelayanan yang terdepan dan dapat menjadi *role model* daerah lain.

Dalam mewujudkan visi yang akan ditetapkan, maka misi yang diemban oleh BPBD Kabupaten Soppeng adalah 1) Mendekatkan pelayanan pemadam kebakaran ke masyarakat; 2) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan komprehensif dan 3) melaksanakan peningkatan kapasitas SDM BPBD. Misi BPBD Kabupaten Soppeng merupakan alasan fundamental dari keberadaan atau “raison d’etre” Bappeda Kabupaten Soppeng sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng. Misi ini akan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh staf BPBD dalam menggerakkan roda organisasi. Adapun penjelasan misi BPBD Kabupaten Soppeng yaitu:

▪ **Mendekatkan Pelayanan Pemadam Kebakaran Ke Masyarakat**

Salah satu masalah besar dalam pelayanan kebakaran adalah luasnya cakupan wilayah pelayanan. Salah satu cara untuk mengurangi luas

cakupan wilayah pelayanan pemadamkebakaran dengan mengembangkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mnedistribusikan sumber daya dengan menempatkan sumber daya peralatan dan personil di beberapa tempat strategis sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM) *Respon Time* (Waktu tanggap 15 menit dapat dicapai).

- **Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan komprehensif**

Secara terencana adalah upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan bencana yang diformulir ke dalam dokumen-dokumen kebencanaan yang dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Secara terpadu dimaknai sebagai penanggulangan bencana bukan hanya urusan BPBD melainkan urusan pemerintah dan masyarakat, sehingga penanggulangan bencana harus dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan secara menyeluruh dimaknai bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan mulai dari pra bencana saat bencana dan pasca bencana.

- **Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM BPDB**

Peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia BPBD yang berkualitas merupakan input kunci dalam keberhasilan

penyelenggaraan penanggulangan bencana/ kebakaran. Kualitas dalam hal ini berkaitan dengan mental model yang tercermin dalam sikap dan perilaku berkaitan dengan kejujuran dan berkepribadian yang kuat, tidak mudah menyerah dan senantiasa berpikir positif untuk menapak masa depannya (Afektif). Peningkatan kapasitas SDM BPBD yang diaktualisasikan melatih pelaksanaan simulasi bencana/ kebakaran secara berkala, sertifikasi personil damkar, dan pelatihan-pelatihan kebencanaan.

3.2.3. Titik-titik Rawan Banjir Kabupaten Soppeng

Pada data BMKG, data titik-titik rawan banjir pada Kabupaten Soppeng (Data BMKG Kabupaten Soppeng) yaitu:

1. Kecamatan Ganra : Desa Ganra
2. Kecamatan Lirilau : Kelurahan Pajalesang
Kelurahan Macanre
Kelurahan Ujung
Kelurahan Cabbeng
Desa Lompulle
3. Kecamatan Marioriawa : Kelurahan Kaca
Kelurahan Attasalo
Kelurahan Manorang Salo
Kelurahan Batu-batu

Desa Laringgi

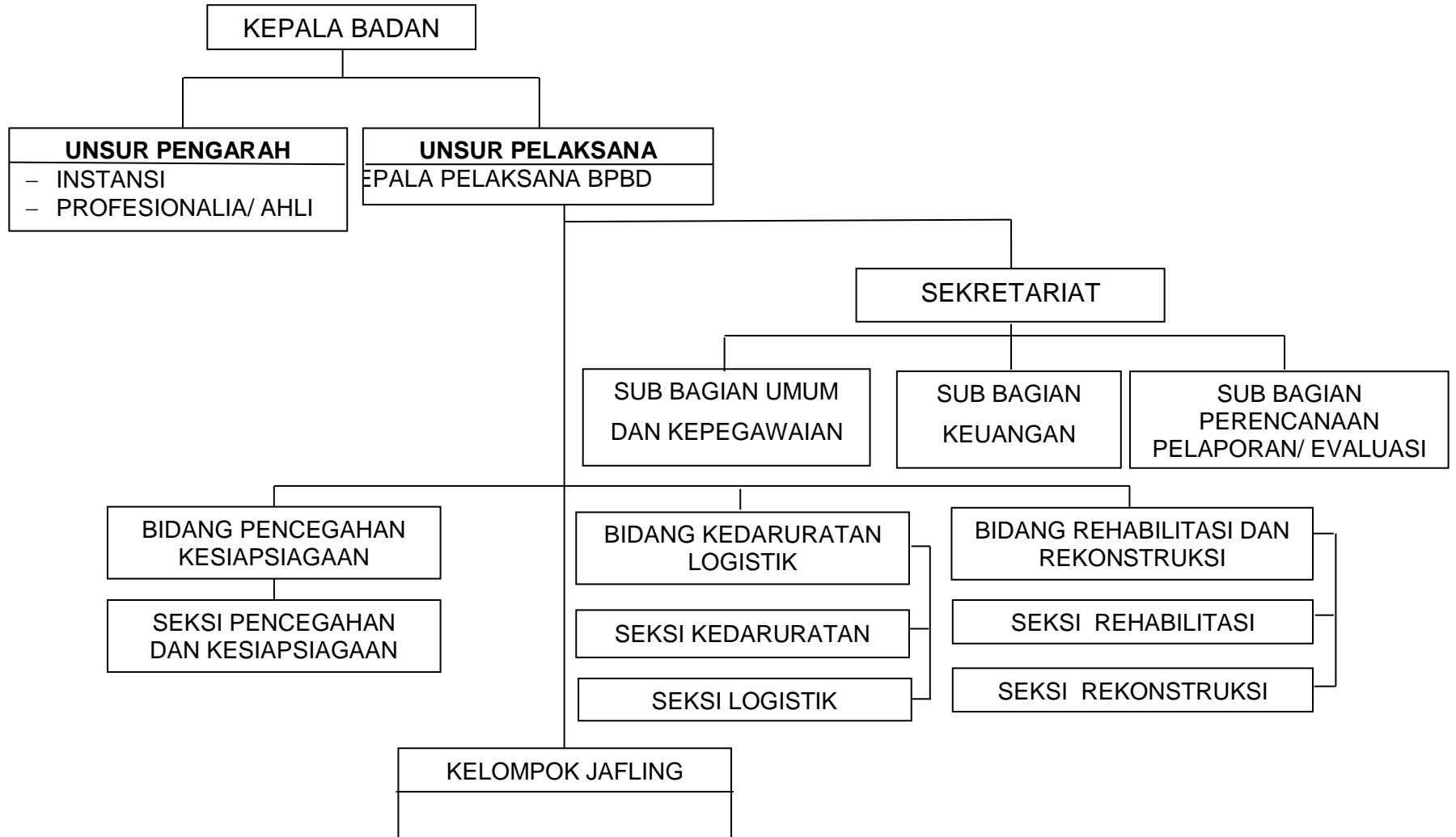
4. Kecamatan Donri-donri : Desa Leworeng

Desa Kessing

3.2.4 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng yaitu sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOPPENG**



3.3 Deskripsi Umum Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng

3.3.1 Sejarah Singkat Kecamatan Ganra

Ganra adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ganra mempunyai yayasan perguruan Islam Ganra ini merupakan suatu yayasan yang di dalamnya terdapat beberapa sekolah dari berbagai tingkatan di antaranya yaitu TK, MI, SD, MTs, SMP dan SMA. Semua sekolah di yayasan ini juga terdapat pondok pesantren yang menjadi rumah kedua bagi siswa-siswa yang mondok. Alumni-alumni dari yayasan perguruan Islam Ganra terutama MTs. Pergis Ganra berpretasi di bidangnya masing-masing. Namun yang paling menonjol adalah pelajaran agama terutama hafalan Al-Quran.

3.3.2 Keadaan georafis Kecamatan Ganra

Kecamatan Ganra merupakan salah satu dari delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Ganra terdiri dari empat desa di antaranya Desa Ganra, Desa Belo, Desa Lompulle dan Desa Enrekang. Dengan Ibukota Kecamatan di Desa Ganra.

Kondisi geografis kecamatan Ganra yaitu suatu wilayah pedesaan yang kaya akan nilai historis, filosofis dan religius yang secara nyata telah banyak memberikan kontribusinya terhadap

perkembangan pendidikan baik dalam bidang agama maupun dalam bidang ilmu pengetahuan umum di Indonesia secara umum dan di Kabupaten Soppeng pada khususnya.

3.3.3 Visi dan Misi Kecamatan Ganra

Adapun visi dan misi Kecamatan Ganra Tahun 2016- 2021 yaitu sebagai berikut:

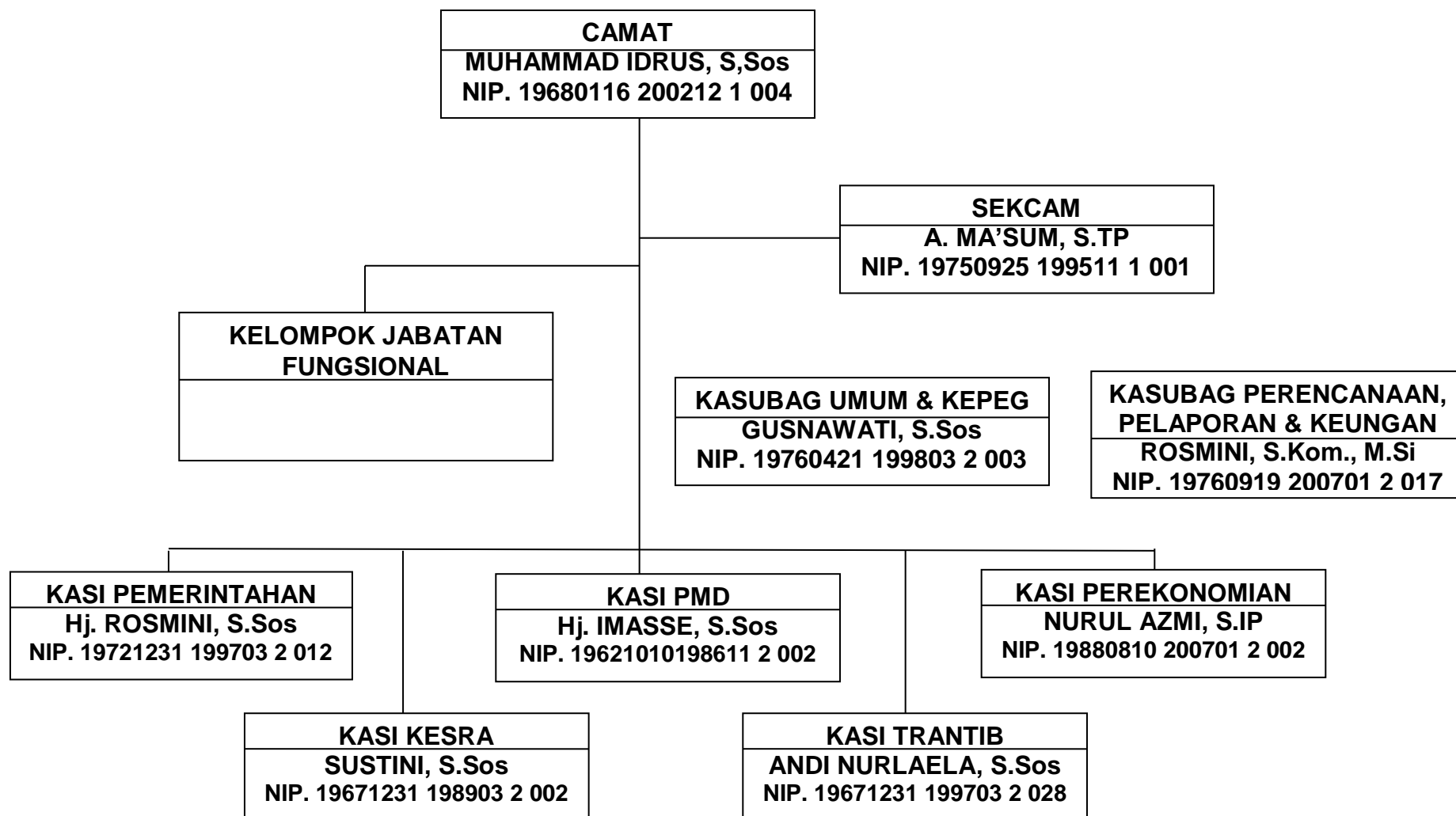
Visi : Terselenggaranya pelayanan publik yang profesional menuju kecamatan Ganra yang lebih baik di Kabupaten Soppeng Tahun 2021

Misi : 1. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang didukung SDM yang profesional.
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

3.3.4 Struktur Organisasi dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Ganra

Adapun struktur organisasi Kecamatan Ganra menurut Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Ganra tahun 2017 yaitu dapat digambarkan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GANRA
PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016**



**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KECAMATAN GANRA TAHUN 2017**

I. Tingkat Kecamatan

1. Dewan Penasehat:

- a. Ketua : Camat Ganra
- b. Sekretaris : Sekretaris Camat Ganra
- c. Anggota :
 - Kapolsek Ganra
 - Danposramil Ganra
 - Kasi Pemerintahan
 - Kanit Intelkam Polsek Ganra

2. Pengurus:

- a. Ketua : Mahyuddin, S.Ag
- b. Sekretaris : Salahuddin Muin, S.Ag., M.Pdi
- c. Anggota :
 - 1. Sarifuddin, S.Sos
 - 2. Suvarman, S.Sos
 - 3. A. Nurlaela, S.Sos
 - 4. Sukardi, S.Hi
 - 5. Irwan Anton, S.Sos
 - 6. A. Nurdiansyah, A.Md. Kom
 - 7. Lutfi, SH
 - 8. Muliati, SE
 - 9. Sugiana
 - 10. Hj. Nurmaini, S.Kom

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan yang berpedoman pada pedoman wawancara yang akan dibahas secara berurutan. Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan antara lain, pihak Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan Ganra, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang menjadi korban bencana banjir. Dilanjutkan akan membahas bagaimana peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Kemudian membahas mengenai hubungan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

Informan dalam penelitian ini, diantaranya Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekertaris Camat, Staf Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat yang

menjadi korban Bencana Banjir. Adapun data dari informan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. AH

AH adalah seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng, AH beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1. AH juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).

2. AM

AM adalah salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng dan mendapat jabatan sebagai salah satu staf. AM beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1. AM juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).

3. RA

RA adalah salah satu staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng. RA beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1. Ra juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).

4. MI

MI adalah Camat Kecamatan Ganra di Kabupaten Soppeng. MI beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1. MI juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).

5. AM

AM adalah Sekretaris Kecamatan Ganra. AM beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1 dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). AM juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).

6. RO

RO adalah Staf Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. RO beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1. RO juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan sekaligus Ibu (Rumah Tangga IRT).

7. KM adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Ganra. Tinggal di daerah Kecamatan Ganra, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah S1. KM juga seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan salah satu guru MTs.

8. IA

IA adalah salah satu pengurus forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Ganra dan juga merupakan salah satu staf di Kecamatan Ganra. Beragama Islam dan pendidikan terakhir adalah S1 dan merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

9. TA

TA adalah salah satu masyarakat yang menjadi korban bencana banjir beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SMA dan pekerjaan sebagai Wiraswasta.

10. SN

SN adalah salah satu masyarakat yang menjadi korban bencana banjir beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SMA dan pekerjaan sebagai Wiraswasta dan Ibu (Rumah Tangga IRT).

4.2 Peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama antara lain. kemanusiaan, keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan non proselitasi.

Prinsip penanggulangan bencana tersebut menjadi acuan bagi kepada Badan Penanggulangan Bencana daerah, sebagaimana wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

“Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka Kami selaku yang menangani hal tersebut harus sigap dan lebih baik dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Soppeng ini”. (Wawancara dengan AH, tanggal 1 Februari 2017)

Dari pernyataan informan tersebut di atas dapat ditarik bahwa sesuai dengan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan sigap dan lebih baik. Dalam menjalankan pelayanan penanggulangan tersebut, maka setiap para pelaku pelayanan wajib memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan pernyataan informan berikut:

“Pelayanan yang diberikan sesuai dengan peran kami sebagai para pelaksana dalam menjalankan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan kebakaran lebih baik. Lebih baik yang kami maknai disini adalah menjadi proses yang proaktif dan tanggap terhadap segala bencana yang terjadi di Kabupaten Soppeng. Hal ini terbukti saat terjadi bencana longsor di sekitar Bulu Dua yang kemudian terjadi kerjasama antar seluruh pihak dalam menangani kejadian tersebut. Dari kejadian tersebut bisa mengindikasikan kepada kami bahwa setiap elemen yang ada di dalam masyarakat terutama kami sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus lebih baik dari masa ke masa”. (Wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2017)

Wawancara dengan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng memberikan gambaran bahwa tentang bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengambil sikap dengan memberikan pelayanan, yaitu ketika terjadi kejadian maka para pelaksana penanggulangan bencana harus proaktif dan tanggap kepada kejadian dengan ikut serta dan melibatkan segala aspek yang dalam masyarakat. Keterlibatan segala pihak dalam mengatasi dan menanggulangi bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD saja tetapi melainkan kepada atas kerjasama segala pihak yang ada dalam masyarakat.

Dilanjutkan oleh pemaparan salah satu staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas kami dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, maka kami tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat dan kerjasama pihak-pihak tertentu tentunya”.
(Wawancara dengan RA, tanggal 1 Februari 2017)

Sesuai dengan pernyataan informan tersebut, maka BPBD menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi dari BPBD itu sendiri. Walaupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini BPBD melakukan pelayanan secara mandiri sesuai dengan pernyataan informan berikut:

“Dalam lingkup Kabupaten Soppeng belum terjadi bencana dengan skala yang besar sehingga pelayanan penanggulangan dilakukan langsung oleh pihak kami yaitu BPBD. Namun, jika terjadi bencana dengan skala yang besar maka kami bekerja sama. Ada dari Dinas

PU, dan pihak-pihak lainnya". (Wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2017)

Dari wawancara dengan informan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa BPBD dalam menjalankan peran tidak lepas dari peran segala pihak yang turut serta dalam menangani bencana dengan skala besar. Hal ini juga sehubungan dengan pernyataan Informan yaitu:

"Hubungan kerjasama antara BPBD dengan instansi atau dinas terkait selama ini baik. Selama ini kerjasama kami terjalin baik antara dinas di Kabupaten Soppeng. Dalam mengevaluasi korban serta memberikan bantuan maka kami dari BPBD sangat terbantu atas kerjasama dinas terkait yang telah membantu penanganan yang dilakukan oleh BPBD". (Wawancara dengan AH, tanggal 1 Februari 2017)

Dari pernyataan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas memberikan keterangan bahwa ketika berada di lokasi, BPBD saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena dampak bencana agar mereka langsung diberikan bantuan.

Pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Soppeng yang telah menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, sebagai berikut :

- i. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara.

- j. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan.
- k. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- l. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- m. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
- n. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- o. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- p. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas kemanusiaan memang dibutuhkan kerjasama pemerintah itu sendiri seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan. Sehubungan dengan pernyataan di atas dalam melaksanakan tugas Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng juga menerangkan seperti dibawah ini:

“Kemarin kejadian banjir di Kecamatan Ganra yaitu tanggal 26 dan 27 terjadi banjir dan tanggul jebol, maka kami koordinasi semua ada PU dan ada yang bawa alat berat dan dinas pertanian juga kami komunikasikan berapa dampak yang terjadi akibat banjir itu. Kan gagal panen. Terdapat 10 titik yang jebol dan terancam 15 titik dengan kerugian 250 hektar sawah jadi ditambah 20 juta jadi ada sekitar 5 milyar kerugian yang diderita ditambah jumlah jalan tani yang rusak yaitu 500 juta dan kami dapat informasi tersebut dari PU dan dinas pertanian serta dari informasi tersebut diberikan kepada kami untuk kami mendatanya”. (Wawancara dengan RA, tanggal 1 Februari 2017)

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa jika memang dilokasi tidak memungkinkan untuk di tanggulangi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meminta bantuan dari *Stakeholder* terkait, seperti PU untuk mengambil bagian yang mana kegiatan ini. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama antar instansi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas terkait terjalin dengan baik. Dalam bekerjasama menanggulangi bencana dan ini merupakan sistem yang patut dijadikan contoh bagi setiap instansi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Ganra merupakan tanggung jawab segala pihak terkait baik pemerintah sampai kepada masyarakat yang terkena banjir tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan informasi sebagai berikut:

“Setelah melakukan penanganan dan melakukan evaluasi, maka kami akan melakukan tugas dalam menyiapkan segala bantuan serta penanggulangan yang tepat untuk bencana banjir yang terjadi, karena daerah sawah yang terkena maka dari dinas terkait yang melakukan pendataan terdapat kerugian kemudian diberikan kepada kami dan bagian PU dalam mengevaluasi lokasi serta lahan yang menjadi dampak terjadinya banjir tersebut. Jadi kami dapat menerima berita serta pendataan dari bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Ganra dan melakukan pendataan dalam mencari solusi pencegahan dari bencana banjir tersebut”. (Wawancara RA, tanggal 1 Fberuari 2017)

Dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Ganra dapat dilakukan pencegahan dengan mengetahui segala dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir tersebut. Mengetahui solusi dari bencana banjir yang terjadi merupakan tanggung jawab setiap elemen pemerintahan. Dimana elemen pemerintahan menjalankan tugasnya masing-masing serta menjalankan kerjasama yang terjalin dengan baik. Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadap masyarakat yang mengalami dampaknya selain kebakaran.

Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran *drainase* atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir sering dikenal dalam 2 bentuk, berupa penggenangan pada daerah yang biasanya kering atau bukan rawa, dan banjir sebagai akibat terjadinya limpasan air

dari alur sungai yang disebabkan karena debit pada sungai melebihi kapasitas pengalirannya.

Dalam mengatasi dan melakukan pencegahannya maka dilakuakn berbagai pencegahann dengan terlebih dahulu mengetahui akar dari penyebab bencana banjir tersebut. Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Ganra terjadi akibat kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap Bencana Banjir tersebut. Hal ini sesuai penyampaian informan dari kepala pelaksana BPBD yaitu sebagai berikut:

“BPBD hanya merupakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng yang menjalankan tugas kami sesuai peran kami, namun peran tersebut tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada peran serta masyarakat, sehingga kami sangat menghimbau masyarakat Kecamatan Ganra agar tanggap kepada bencana banjir yang terjadi dan peduli pada bencana yang terjadi dengan tidak membuang sampah hasil pertanian di sungai serta menjaga aliran air agar tetap mengalir”. (Wawancara dengan AH, tanggal 1 Februari 2017)

Pernyataan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng memberikan gambaran bahwa bencana banjir dapat dicegah apabila keikutsertaan peran serta masyarakat terhadap bencana banjir yang terjadi. Pencegahan ini nuga dapat dilakukan dengan a) pembuatan Peta Rawan Banjir yang dilaksanakan secara fungsional oleh Bakosurtanal dengan melibatkan Kantor Meneg LH/Bapedal, dan Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Pekerjaan Umum; b) Sosialisasi peta daerah rawan banjir dan pemberdayaan masyarakat yang

melibatkan Departemen/Dinas Sosial, Bakornas PBP/ Satkorlak PBP/Satlak PBP, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan dan instansi terkait lainnya; c) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Banjir dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan melibatkan Satkorlak PBP/Badan Kesbanglinmas Propinsi dan Kabupaten/Kota; serta d) Sistem Peringatan Dini oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Departemen Perhubungan dengan melibatkan LAPAN, BPP Teknologi, kantor Meneg LH/Bapedal dan instansi lain yang terlibat.

4.3 Peran Pemerintah Kecamatan Ganra dengan Masyarakat dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng

Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan proaktif dari berbagai pihak, baik itu pada pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana (Johan Minnie, 2010).

Menurut Kaufman dan Rasyid (2011: 13) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian

dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan dan kekuatan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Soopeng memiliki titik-titik rawan banjir dari hasil pantauan BMKG Kabupaten Soppeng. Titik tersebut merupakan titi-titik yang sering dan selalu dilanda bencana banjir. Adapun titik-titik tersebut yaitu Desa Ganra (Kecamatan Ganra), Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Macanre, Kelurahan Ujung. Kelurahan Cabbeng, Desa Lompulle (Kecamatan Lilirilau), Kelurahan Kaca, Kelurahan Attasalo, Kelurahan Manorang Salo, Kelurahan Batu-batu, Desa Laringgi (Kecamatan Marioriawa), Desa Leworeng, Desa Kessing (Kecamatan Donri-donri). Data tersebut memberikan gambaran bahwa bencana banjir di Kabupate Soppeng mempunyai 17 titik yang perlu ditanggulangi.

Salah satu titik yang paling sering dilanda banjir adalah Desa Ganra (Kecamatan Ganra), sehingga dalam hal ini, pemerintah kabupaten Soppeng mempunyai peran yang besar dalam penanggulangan bencana di beberapa titik yang ada khususnya pada Kecamatan Ganra, yang merupakan peran bagi pemerintah kecamatan untuk waspada serta mengetahui permasalahan banjir pada kawasan tersebut. Peran penanggulangan ini bukan hanya

berfokus pada BPBD tetapi peran semua lapisan yang ada di Kecamatan Ganra.

Hal ini sesuai dengan penuturan Camat Kecamatan Ganra yang menuturkan:

“Bencana banjir yang terjadi bukan hanya tanggung jawab BPBD saja, tetapi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini karena tercatat bahwa di Kecamatan kami merupakan langganan banjir maka kami pun membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Ganra dan itu pun dikoordinir secara langsung dan para staf beserta masyarakat yang dilibatkan dalam forum tersebut”. (Wawancara dengan MI, tanggal 3 Februari 2017)

Peran serta pemerintah merupakan salah satu kunci dalam penanganan bencana banjir yang menyeluruh. Bukan hanya itu dengan keterlibatan langsung pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana merupakan salah satu langkah yang pasti dalam menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Hal ini juga dilanjutkan oleh informan yang menuturkan sebagai berikut:

“Solusi dalam bencana banjir ini adalah dukungan semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat tentunya. Sejauh ini masyarakat serta memberikan dukungan yang terbaik dari mereka sisanya kami yang harus menyatukan dukungan tersebut” (Wawancara dengan AM, tanggal 3 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng diatas mengatakan bahwa masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Ganra telah bekerjasama dengan baik memberikan dukungan terbaik. Pemerintah beserta masyarakat saling membantu dalam

menanggulangi terjadinya bencana banjir. Dimana bekal tersebut didapat dari hasil sosialisai pemerintah untuk mengantisipasi datangnya banjir, dengan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan ini ditambahkan oleh satu staf kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan yang menuturkan yaitu:

“Kami membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Ganra sebagai salah satu langkah pemerintah bekerjasama secara langsung bersama masyarakat kecamatan Ganra dalam menanggulangi bencana banjir yang sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat besar”. (Wawancara dengan RO, tanggal 3 Februari 2017)

Sesuai dengan pernyataan informan maka penulis dapat mendapatkan gambaran bahwa langkah pemerintah dalam menanggulangi bencana yaitu salah satunya adalah bekerjasama secara langsung dan terjun langsung bersama masyarakat dalam mencari solusi bencana banjir yang terjadi. Dalam hal ini, pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan

itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan mengatasi masalah populasi. Upaya penanggulangan bencana difokuskan pada pemerintah lokal yaitu dalam lingkup kecamatan sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal yaitu pemerintah kecamatan.

Wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di Desa Ganra yang mengatakan sebagai berikut:

“Kami juga diikutkan dalam pengurus forum kewaspadaan dini bencana banjir yang dibentuk oleh pemerintah Kecamatan Ganra dan Alhamdulillah, sejauh ini forum tersebut sangat bagus dalam mengkomunikasi tentang solusi permasalahan bencana yang terjadi di Kecamatan Ganra”. (Wawancara dengan IA, tanggal 5 Februari 2017)

Dari penuturan diatas mengindikasikan bahwa masyarakat telah menerima dengan baik pengetahuan dan himbauan yang disosialisasikan oleh pemerintah sehingga masyarakat telah mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ini menindikasikan bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan konsep manajemen penanggulangan bencana yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Ini sejalan dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ganra yaitu sebagai berikut:

“Kami bekerjasama sama bersama para pegawai dan staf kecamatan, dan BPBD dalam mencari solusi dari bencana banjir yang terjadi di Ganra ini. Kalau tidak ada peran dari pemerintah beserta masyarakat, kami akan terus-terusan terkena banjir dan itu menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi juga tentunya”. (Wawancara dengan KM, tanggal 5 Februari 2017)

Dari hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa dengan pembentukan forum dari Kecamatan Ganra serta dukungan masyarakat dapat memberikan dampak yang menyatu dengan visi dan misi dari BPBD dimana dibutuhkan keterlibatan segala pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik.

Dalam rangka membantu pemecahan masalah banjir khususnya di tingkat kabupaten dan kota perlu dibentuk forum komunikasi konservasi air dan banjir, yang fungsinya membantu pemerintah untuk memecahkan berbagai permasalahan air. Forum ini diharapkan akan terus berkembang sebagai sarana koordinasi yang efektif karena mekanisme kerjanya dilandasi dengan etos kerja sama yang setara, tanpa ada hambatan birokrasi. Pembangunan harus menjamin terselenggaranya konservasi air dan mencegah banjir, yang ditunjukkan dengan tata ruang yang sesuai bagi perlindungan tata air, perlindungan lahan dari berbagai kerusakan, memelihara kesuburan tanah, konservasi air untuk berbagai penggunaan. Termasuk pengelolaan yang bijaksana untuk berbagai pemanfaatan, perlindungan banjir, dan mengurangi sedimentasi lumpur, serta berbagai sampah industri maupun rumah tangga (Alikodra, 2003).

Dibentuknya forum tersebut juga memberikan dampak langsung kepada para korban yang terkena banjir. Berikut penuturan korban bencana banjir di Kecamatan Ganra yaitu:

“Saya sangat terbantu dengan bantuan segala pihak, ada dari kecamatan yang memberikan kami bantuan serta BPBD yang memberikan tenda serta prasarana bagi kami dalam memulihkan diri dari bencana banjir yang terjadi kepada kami” (Wawancara dengan TA, tanggal 6 Februari 2017)

Kerjasama dari forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Ganra beserta pemerintah Kecamatan Ganra dan dukungan penuh dari BPBD dan dinas-dinas terkait sangat membantu para korban bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Ganra. Keberadaan banjir tidak dapat dicegah, pemerintah bersama masyarakat hanya dapat meminimalkan melalui penerapan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan, kampanye, dan bimbingan tentang cinta lingkungan diintensifkan sebagai program pembangunan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai fasilitator, tokoh dan pemuka masyarakat sebagai sosok anutan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pendamping pembangunan, dan perguruan tinggi sebagai pengembang teknologi sangat berarti untuk melangkah bersama dalam memberdayakan peran aktif masyarakat sebagai upaya pengendalian banjir dan kekeringan.

Wawancara dengan salah satu warga yaitu sebagai berikut:

“Saya sangat berterima kasih terhadap semua pihak yang terkait yang telah membantu dan memberikan saya tempat tinggal sementara dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi dan kerjasama yang dilakukan pemerintah sangat baik kepada kami” (Wawancara dengan SN, tanggal 6 Februari 2017)

Penulis menyimpulkan informasi dari pernyataan informan diatas bahwa dalam rangka menghadapi bencana alam yaitu perlu dilakukan pendidikan dini tentang tanggap darurat, serta pelatihan-pelatihan sehingga senantiasa memberikan manfaat dan tentunya kesiapsiagaan bagian setiap masyarakat ketika menghadapi bencana. Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dapat dikatakan terjalin dengan baik untuk itu harus ditingkatkan lagi agar hubungan yang terjalin menjadi contoh bagi yang lain atau menjadi *role model* bagi daerah lain.

Dalam menanggulangi bencana banjir, pemerintah daerah terkait untuk meminimalisir terjadinya banjir. Efektivitas suatu kebijakan pemerintah tidak akan berarti apabila mengenai bencana banjir dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut dari pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi banjir.

Pemerintah harus melakukan hal-hal yang mengurangi banjir seperti, membuat waduk yang dapat menampung air hujan dan menyediakan tempat

sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan serta masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk menanggulangi banjir dan melakukan penghijauan atau penanaman pohon disekitar lahan kosong. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng telah dijalankan sesuai dengan visi dan misi. Ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan setiap penanggulangan secara tepat dan lebih baik yaitu penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang disadarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, serta dalam penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
2. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir telah terjalin dengan baik sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi dengan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Ganra yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Ganra bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun

instansi/dinas terkait lainnya dan masyarakat juga ikut membantu serta mendukung peran pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang terjadi.

5.2 Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar tetap konsisten menjaga prinsip serta visi dan misi badan penanggulangan bencana.
2. Pemerintah daerah sebaiknya mengupayakan membangun tanggul-tanggul yang jebol serta mengantisipasi tanggul yang terancam bencana banjir.
3. Masyarakat hendaknya memberikan keikutsertaan dalam membantu pemerintah Kecamatan Ganra mencari solusi pencegahan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Ganra.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua, Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana.

Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*. Departemen Komunikasi dan Informatika RI: Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Safiie, Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju: Bandung.

Siagian, Sondang. 2001. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta.

Siswoko. 1985. *Pola Pengendalian Banjir pada Sungai*. Jakarta: Dirjen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.

_____. _____. *Buletin pengairan 2*. Jakarta: Dirjen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.

Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali: Jakarta.

Tarjono, 1996. *Kajian Erosi Permukaan dan Perlakuan Konservasi Tanah di Sub DAS Gobeh Kabupaten Dati II Wonogiri*. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wirawan, S. 2002. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

B. Hasil Penelitian

Arifin, S. 2007. *Persepsi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Hutan Rakyat dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Tesis Ilmu Lingkungan. Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Latief, Abdul 2015 (Skripsi). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Laula, Billy dan Djoni Irianto, 2014 (Jurnal). **Analisis Penanggulangan Banjir Pada Sistem Drainase Di Jalan Semarang Kecamatan Bubutan Kota Surabaya-Jawa Timur**. Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya.

C. Sumber lain

Alikodra. H.A. 2003. *Renungan Banjir*. OPINI di Media Indonesia. (19 Februari 2003). www.mediaindo.co.id/cetak. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

- Basyar, Abdul Hakim. 2002. *Majalah PP*, (online), <http://webcache.googleusercontent.com/search>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.
- Kaufman & Rasyid. 2011. *Tugas dan Fungsi Pemerintah*, (online), <http://2frameit.blogspot.com/2011/11/tugasdanfungsipemerintah.html>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.
- Nugroho, S.P. 2002. *Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Aliran.Permukaan, Sedimen dan Unsur Hara*. Jurnal sains dan teknologi Indonesia. Website: <http://www.iptek.net.id>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.
- Paripurno, Eko Teguh. 2011 *Panduan Pengelolaan Risiko Bencana berbasis Komunitas (PRBBK)*, (online), [https://www.academia.edu/5825822/Panduan Pengelollan Risiko Bencana berbasis Komunitas PRBBk](https://www.academia.edu/5825822/Panduan_Pengelollan_Risiko_Bencana_berbasis_Komunitas_PRBBk). Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.
- Ramdhani, Nurfitri. 2013. *Kebijakan Lingkungan Hidup*, (online), <http://nurfitriramdhani.blogspot.com/2013/06/kebijakanlingkungan-hidup.html>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.
- Supriyatna, Yayat. 2007. *Analisis Dampak Bencana terhadap Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan SNSE.*, (online), <https://lib.ui.ac.id/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.
- Wijayanto, Koko. 2012. Recognize : *Pencegahan dan Manajemen Bencana*, (online), <https://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

**L
A
M
P
I
R
A
N**





PEDOMAN WAWANCARA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Peraturan daerah apa saja yang mengatur tentang penanggulangan bencana ?
2. Bagaimana hubungan kerjasama antara BPBD dengan instansi/dinas terkait ?
3. Bagaimana hubungan kerjasama antara BPBD dengan masyarakat ?
4. Upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir ?
5. Adakah anggaran disediakan untuk rekonstruksi pasca bencana tersebut ?

KECAMATAN GANRA

1. Bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi bencana banjir ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi bencana banjir ?
3. Apakah pihak BPBD atau ada instansi/dinas yang pernah mengadakan sosialisasi mengenai kebencanaan dan cara penanggulangan dini bencana banjir ?
4. Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak BPBD dengan masyarakat sekitar ?

MASYARAKAT (KORBAN BANJIR)

1. Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak BPBD dengan masyarakat sekitar ?
2. Apa saja yang dilakukan Pemda dalam penanggulangan bencana banjir ?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir
4. Apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai kebencanaan dengan cara penanggulangan dini bencana banjir ?